



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada huruf a, BAB III Lampiran Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015);
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);

18. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.935.495.364.126,- mengalami penambahan sebesar Rp.13.007.946.000,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 948.503.310.126,-dengan rincian sebagai berikut :

2. Belanja

a. Belanja Operasional

Semula	Rp.631.277.375.206
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 417.283.600</u>
Jumlah belanja operasional	
Setelah perubahan	Rp.631.694.658.806

b. Belanja Modal

Semula	Rp.222.846.812.620
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 12.590.662.400</u>
Jumlah belanja Modal	
Setelah perubahan	Rp.235.437.475.020

Jumlah belanja Daerah

Setelah perubahan	Rp.948.503.310.126
Surplus / (Defisit) Setelah perubahan	Rp.(27.543.210.085)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.22.042.779.254
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.13.007.946.000</u>

Jumlah belanja Modal Setelah perubahan	Rp.35.050.725.254
Jumlah pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp.27.543.210.085
Sisa lebih pembiayaan Setelah perubahan	Rp.0.00

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Pebruari 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 550.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)		PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	%	
1	2	3				4
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.113.789.882	46.113.789.882			
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	8.250.000.000	8.250.000.000			
4.1.1.01.	Pajak Hotel	80.000.000	80.000.000			
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.350.000.000	1.350.000.000			
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	20.000.000	20.000.000			
4.1.1.04.	Pajak Reklame	100.000.000	100.000.000			
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000	4.000.000.000			
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.065.000.000	1.065.000.000			
4.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.400.000.000	1.400.000.000			
4.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	235.000.000	235.000.000			
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.654.699.600	5.654.699.600			
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.711.906.600	1.711.906.600			
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.837.793.000	3.837.793.000			
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	105.000.000	105.000.000			
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	32.209.090.283	32.209.090.283			
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	177.500.000	177.500.000			
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000	1.500.000.000			
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian	800.000.000	800.000.000			
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	25.731.590.283	25.731.590.283			
4.1.4.19.	Dana Kapitasi IKN pada FKTP	4.000.000.000	4.000.000.000			

4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	857.669.710.158	857.669.710.158		
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	849.588.070.856	849.588.070.856		
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	773.880.312.856	773.880.312.856		
4.2.1.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	27.159.466.000	27.159.466.000		
4.2.1.06.	Dana Desa	48.548.292.000	48.548.292.000		
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	8.081.639.302	8.081.639.302		
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	8.081.639.302	8.081.639.302		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	17.176.600.000	17.176.600.000		
4.3.1.	Pendapatan Hibah	17.176.600.000	17.176.600.000		
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.500.000.000	4.500.000.000		
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.676.600.000	12.676.600.000		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	920.960.100.041	920.960.100.041		
5	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASIONAL	631.277.375.206	631.694.658.806	417.283.600	
5.1.1.	Belanja Pegawai	372.839.328.804	373.009.728.804	170.400.000	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	289.583.207.706	289.583.207.706		
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	18.923.370.048	18.923.370.048		
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000	601.600.000		
5.1.1.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	400.000.000	400.000.000		
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	275.234.980	275.234.980		
5.1.1.06.	Gaji dan Tunjangan DPRD	11.238.420.730	11.238.420.730		
5.1.1.07.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	281.305.290	281.305.290		
5.1.1.08.	Honorarium PNS	18.575.775.070	18.746.175.070	170.400.000	
5.1.1.08.04	Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	114.195.000	135.195.000	21.000.000	
5.1.1.08.05	Honorarium Tim	6.290.304.070	6.335.304.070	45.000.000	
5.1.1.08.06	Honorarium Petugas / Penjaga	5.916.154.000	6.020.554.000	104.400.000	
5.1.1.09.	Honorarium Non PNS	32.960.414.980	32.960.414.980		
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.798.646.402	233.045.530.002	246.883.600	
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.176.014.821	11.197.882.421	21.867.600	
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.357.801.885	6.379.669.485	21.867.600	
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.925.514.509	7.925.514.509		
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.409.060.940	29.409.060.940		
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.418.250.000	4.418.250.000		
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.423.811.300	7.423.811.300		
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.394.602.960	7.423.802.960	29.200.000	

5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.975.149.700	3.004.349.700	29.200.000		
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.290.915.000	1.290.915.000			
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.077.924.000	2.077.924.000			
5.1.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	25.000.000	25.000.000			
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.174.629.490	1.174.629.490			
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.387.993.000	19.387.993.000			
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	557.270.000	557.270.000			
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	64.800.000	64.800.000			
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.400.493.450	1.400.493.450			
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	<u>74.428.179.549</u>	<u>74.623.995.549</u>	<u>195.816.000</u>		
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.338.274.050	42.380.274.050	42.000.000		
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.839.905.499	31.993.721.499	153.816.000		
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	265.697.000	265.697.000			
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	5.127.739.600	5.127.739.600			
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.859.709.100	22.859.709.100			
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.157.265.000	1.157.265.000			
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	916.000.000	916.000.000			
5.1.2.24.	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.760.246.400	3.760.246.400			
5.1.2.25.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.575.740.000	4.575.740.000			
5.1.2.28.	Belanja Barang Dana PAUD	250.200.000	250.200.000			
5.1.2.29.	Belanja Barang Dana BLUD	25.731.590.283	25.731.590.283			
5.1.5.	Belanja Hibah	<u>25.289.400.000</u>	<u>25.289.400.000</u>			
5.1.5.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	19.500.000.000	19.500.000.000			
5.1.5.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.525.000.000	1.525.000.000			
5.1.5.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.264.400.000	4.264.400.000			
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	<u>350.000.000</u>	<u>350.000.000</u>			
5.1.6.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat	350.000.000	350.000.000			
5.2.	BELANJA MODAL	<u>222.846.812.620</u>	<u>235.437.475.020</u>	<u>12.590.662.400</u>		
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	<u>2.099.420.000</u>	<u>2.099.420.000</u>			
5.2.1.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	<u>119.420.000</u>	<u>119.420.000</u>			
5.2.1.20.	Belanja Modal Perolehan Aset Tanah	1.980.000.000	1.980.000.000			

5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.895.666.670	50.627.666.670	4.732.000.000		
5.2.2.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.959.500.000	2.959.500.000			
5.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	313.000.000	313.000.000			
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.592.619.700	2.592.619.700			
5.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	21.500.000	21.500.000			
5.2.2.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	43.200.000	43.200.000			
5.2.2.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4.000.000	4.000.000			
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	390.233.950	390.233.950			
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.870.808.080	1.870.808.080			
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.703.743.830	10.265.743.830	4.562.000.000		
5.2.2.16.02	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	185.109.120	610.359.120	425.250.000		
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.733.322.500	1.766.712.500	33.390.000		
5.2.2.16.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	20.770.000	58.360.000	37.590.000		
5.2.2.16.07	Belanja modal Pengadaan Laptop	935.886.200	1.237.656.200	301.770.000		
5.2.2.16.10	Belanja Modal Pengadaan Tablet		3.764.000.000	3.764.000.000		
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.559.705.400	2.559.705.400			
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	668.787.000	838.787.000	170.000.000		
5.2.2.18.07	Belanja modal Pengadaan Infocus / Proyektor	76.695.400	246.695.400	170.000.000		
5.2.2.21.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	28.105.064.360	28.105.064.360			
5.2.2.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.500.000	4.500.000			
5.2.2.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	401.850.000	401.850.000			
5.2.2.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15.000.000	15.000.000			
5.2.2.70.	Belanja Modal Perolehan Aset Peralatan dan Mesin	168.799.500	168.799.500			
5.2.2.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	73.354.850	73.354.850			
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.607.224.000	63.037.718.000	4.430.494.000		
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.229.425.885	41.229.425.885			
5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.634.286.000	2.634.286.000			
5.2.3.09.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.064.775.000	1.064.775.000			
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	246.389.700	246.389.700			
5.2.3.25.	Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	3.277.108.500	3.526.848.500	249.740.000		
5.2.3.25.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	2.062.288.200	2.312.028.200	249.740.000		
5.2.3.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lainnya	10.155.238.915	14.335.992.915	4.180.754.000		
5.2.3.99.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lainnya	2.659.281.400	6.926.045.400	4.180.754.000		

5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.145.787.650	116.573.956.050	3.428.168.400	
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	63.760.044.025	63.760.044.025		
5.2.4.02.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	9.781.684.850	9.781.684.850		
5.2.4.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	12.786.394.000	14.408.012.400	1.621.618.400	
5.2.4.04.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	12.786.394.000	14.408.012.400	1.621.618.400	
5.2.4.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.025.950.000	6.025.950.000		
5.2.4.07.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	94.285.000	94.285.000		
5.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	818.334.850	818.334.850		
5.2.4.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.037.714.100	5.651.744.100	1.614.030.000	
5.2.4.09.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	4.029.614.100	5.643.644.100	1.614.030.000	
5.2.4.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	5.330.720.000	5.330.720.000		
5.2.4.11.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	289.210.000	289.210.000		
5.2.4.12.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.446.034.850	3.446.034.850		
5.2.4.18.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	1.202.551.000	1.202.551.000		
5.2.4.20.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	50.250.000	50.250.000		
5.2.4.21.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	435.192.000	435.192.000		
5.2.4.23.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	45.000.000	45.000.000		
5.2.4.30.	Belanja Modal Perolehan Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan	4.702.238.125	4.894.758.125	192.520.000	
5.2.4.30.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan,Irigasi dan Jaringan	4.502.582.125	4.695.102.125	192.520.000	
5.2.4.99.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya	340.184.850	340.184.850		
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.660.394.300	2.660.394.300		
5.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	2.354.865.900	2.354.865.900		
5.2.5.04.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	3.350.000	3.350.000		
5.2.5.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	296.128.400	296.128.400		
5.2.5.15.	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6.050.000	6.050.000		
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	438.320.000	438.320.000		
5.2.6.01.	Belanja Modal Aset Lainnya	438.320.000	438.320.000		
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.810.000.000	3.810.000.000		
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	3.810.000.000	3.810.000.000		
5.3.1.01.	Belanja Tak Terduga	3.810.000.000	3.810.000.000		

5.4.	BELANJA TRANSFER	77.561.176.300	77.561.176.300		
5.4.3.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	77.137.015.300	77.137.015.300		
5.4.3.01.	Dana Desa dan Desa Adat	48.548.292.000	48.548.292.000		
5.4.3.02.	Alokasi Dana Desa	28.588.723.300	28.588.723.300		
5.4.4.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	424.161.000	424.161.000		
5.4.4.01.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	424.161.000	424.161.000		
	JUMLAH BELANJA DAERAH	935.495.364.126	948.503.310.126	13.007.946.000	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.535.264.085)	(27.543.210.085)	#####	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	22.042.779.254	35.050.725.254	13.007.946.000	
6.1.1.05.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	22.042.779.254	35.050.725.254	13.007.946.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.042.779.254	35.050.725.254	13.007.946.000	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.2.1.	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	7.515.169	7.515.169		
6.2.1.11.	Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya Kepada Lembaga Keuangan Bank	7.515.169	7.515.169		
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL DAERAH	7.500.000.000	7.500.000.000		
6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000	7.500.000.000		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.507.515.169	7.507.515.169		
	PEMBIAYAAN NETO	14.535.264.085	27.543.210.085	13.007.946.000	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM